

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
COVID-19 DIKELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR KOTA
BANJARMASIN**

¹Noorlia fitri, Nikhrawi Hamdie², Beni Akhmad³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 17120100

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 1105026401

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, 1109089201

E-mail : noorliafitri.199@gmail.com

ABSTRAK

NOORLIA FITRI , NPM.17120100 “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Dikelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin*” Bimbingan Bapak A.Nikhrawi Hamdie,S.Sos.,SH.,MH sebagai pembimbing utama dan Bapak BeniAkhmad,M.AP sebagai Co pembimbing .

Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah dalam partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 digambarkan melalui partisipasi masyarakat dalam hal ini ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya virus covid-19 dan kurangnya kedisiplinan masyarakat dengan enggan menerapkan anjuran pemerintah serta kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dan ada masyarakat yang terpapar dan tidak memeriksakan diri kepuskesmas . dan faktor pendukung yaitu masyarakat bisa bekerja sama dalam melakukan pencegahan covid-19 dan masyarakat bisa mengetahui bahayanya covid-19 yang mana telah diedukasi oleh pemerintah tentang bahayanya covid-19 serta berupa bantuan sembako buat yang isolasi mandiri dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pencegahan covid-19 seperti melakukan pembagian masker dan penyemprotan diwilayah warga yang terpapar covid-19 .

Kata kunci : Implementasi kebijakn , partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

NOORLIA FITRI , NPM.17120100 “*Implementation of Government Policies Regarding Community Participation in Combating Covid-19 in the Antas Kecil Timur Sub-district, Banjarmasin City*” Guidance by Mr. A.Nikhrawi Hamdie,S.Sos.,SH.,MH as the main supervisor and Mr. BeniAkhmad,M. AP as Co-supervisor.

The results of the study show that the implementation of government policies in community participation in overcoming COVID-19 is illustrated through community participation in this case there are supporting factors and inhibiting factors in community participation as for the inhibiting factors, namely the lack of public awareness of the dangers of the Covid-19 virus and the lack of community discipline by reluctance to apply. government recommendations and the lack of facilities provided by the government for the community and there are people who are exposed and do not check themselves at the health center. and supporting factors, namely the community can work together in preventing covid-19 and the community can know the dangers of covid-19 which has been educated by the government about the dangers of covid-19 and in the form of basic food assistance for self-isolation and facilities provided by the government in preventing covid-19 19 such as distributing masks and spraying in the areas of residents exposed to COVID-19.

Key words : Policy implementation , community participation .

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang sekarang melanda Indonesia yang disebabkan oleh korona virus atau virus disease 2019 . wabah virus korona pertama kali dideteksi di kota wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan desember 2019 ditetapkan pandemic oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Virus SARS-CoV-2 yang telah diduga menyebar diantara orang-orang yang terutama bisa melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk dan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal dan selain itu virus juga dapat menyebarkan karena menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan menyentuh wajah seorang yang terpapar covid-19. Virus covid-19 bisa menular saat orang yang menderitanya mempunyai gejala dan penyebarannya mungkin terjadi sebelum gejala itu muncul. adapun langkah-langkah pencegahan Namun anjuran tersebut masih sulit untuk dilakukan oleh masyarakat karena masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam

yang direkomendasikan diantaranya dengan melakukan gerakan 5 M yaitu:

1. Mencuci tangan
2. Memakai masker
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Membatasi mobilitas dan interaksi.

Serta pemantauan dan isolasi mandiri untuk orang dicurigai bahwa mereka yang terinfeksi atau terpapar virus covid-19 . dalam menghadapi fenomena yang tengah terjadi akibat covid-19 pemerintah ada dan hadir untuk rakyatnya dengan memberikan berbagai solusi dan baik itu berupa materi atau non materi serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara melakukan social distancing serta anjuran 5 M yang diterapkan oleh pemerintah .

menjalankan kebijakan dan himbauan pemerintah sehingga masyarakat tidak merespon dengan baik bahkan melanggar anjuran dan kebijakan

yang telah diberikan.oleh karenanya mereka kurang menanggapi hal ini yang merupakan kondisi yang penting bagi kehidupan. keberhasilan suatu pembangunan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam sebuah proses penyusunan rencana pembangunan yang dalam hal ini pencegahan penyebaran Covid-19.

Masyarakat yang berada dikelurahan antasan kecil timur mengalami kesulitan dalam menjalankan social distancing dan anjuran 5M dikarenakan kebiasaan dalam kebersamaan , kerja sama , solidaritas dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. namun bagi masyarakat awam mereka beranggapan bahwa social distancing hanya sebatas menjaga jarak tanpa tahu apa manfaat dan tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang adapun masalah yang diuraikan maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 dikelurahan Antasan Kecil Timur.
2. Dan Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 dikelurahan Antasan Kecil Timur.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan yaitu

1. untuk mengetahui bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah .
2. untuk mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur kota Banjarmasin.

ALAT DAN METODE

Pada penelitian ini masalah yang ingin dianalisis oleh peneliti yaitu "Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Dikelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin" peneliti menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi literatur

yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai jurnal dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

2. Studi lapangan

yaitu teknik pengumpulan data yang didapat secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara :

a. wawancara

yaitu dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab kepada narasumber yang sesuai masalah yang diangkat.

b. observasi

yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dari penelitian

c. dokumentasi

yaitu pengumpulan data melalui catatan, arsip dan segala bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur kota Banjarmasin dalam konsep pelaksanaan (implementasi)

perumusan suatu kebijakan dimana menyangkut program maupun kegiatan yang dimana selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi karena baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan berarti dan disampaikan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983;61) dan sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino (2006::139) yaitu : pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya . keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi dan menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya kebijakan yang ada tidak bisa terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Pencegahan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah itu sendiri ataupun hanya mengandalkan tenaga medis saja tetapi dengan seluruh masyarakat dengan bersama-sama berpartisipasi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk

mengakomodasikan kepentingan mereka dalam sebuah proses penyusunan rencana pembangunan yang dalam hal ini pencegahan penyebaran Covid-19.

Dan disini peneliti dapat melihat kebijakan yang dibuat pemerintah sangat efektif untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam penganggulangan covid-19 yang terjadi di banjarmasin saat ini. Dimana pemerintah menganjurkan social distancing dan anjuran 5 M yaitu :

- 1.Mencuci tangan
- 2.Memakai masker
- 3.Menjaga jarak
- 4.Menjauhi kerumunan
- 5.Membatasi mobilitas dan interaksi

Dalam penelitian ini peneliti focus pada kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu kebijakan social distancing dan anjuran 5 M .karena berdasarkan wawancara dan observasi dengan masyarakat serta dengan pihak kelurahan antasan kecil

timur. Dalam mencegah dalam dampak menanggulangi dampak Covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

2. Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

4. Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

5. Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional.

6. Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.

7. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Jadi sudah begitu banyak produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka mengatasi pandemi ini. Karena dampaknya sangat besar. Namun dari banyaknya masyarakat yang menerapkan anjuran 5 M ada beberapa masyarakat yang kurang tahu apa anjuran 5 M dan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah maka dari itu perlu adanya penyuluhan atau edukasi serta fasilitas kepada masyarakat. Maka dari itu hendaknya masyarakat bisa mematuhi peraturan dan menerapkan anjuran dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. pembangunan masyarakat yang diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut.

Dalam berpartisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan covid-19 dan pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing dan

anjuan 5 M guna memotong rantai penyebaran virus.

Adapun Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela.

Menurut masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan covid-19 mereka sangat antusias dan berpartisipasi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah . masyarakat juga berpartisipasi dengan melakukan mengecek suhu tubuh ,mencuci tangan dengan air yang mengalir serta memakai masker .

terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu :

- 1.Adanya tanggung jawab.
- 2.Kesediaan,memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok.
- 3.Kesediaan mereka terlibat di dalam kelompok Sesuai dengan pernyataan Sastropetro, (1988:37), bahwa “Keterlibatan Spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”.berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi seseorang sebaiknya didasarkan atas kesadaran sendiri, keyakinan serta kemauan, sebab hal itu akan bermanfaat bagi dirinya. Karena dirinya merasa tidak dipaksakan sehingga dalam mengikuti kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukarela.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti focus pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur karna berdasarkan hasil wawancara serta data yang digunakan yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 . dimana peneliti melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat yang berada dikelurahan antasan kecil timur dengan mematuhi protocol kesehatan dengan menerapkan anujan 5 M yaitu :

- 1.Mencuci tangan
- 2.Memakai masker
- 3.Menjaga jarak
- 4.Menjauhi kerumunan
- 5.Menbatasimobilitas daninteraksi

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) partisipasi lebih pada alat

sehingga di maknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang di lakukan.

Dalam berpartisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan covid-19 dan pemerintah menganjurkann masyarakat untuk menerapkan social distancing dan anjuran 5 M guna memotong rantai penyebaran virus. Adapun Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela.

Menurut masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan covid -19 mereka sangat antusias dan berpartisipasi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah masyarakat juga berpartisipasi dengan melakukan mengecek suhu tubuh ,mencuci tangan dengan air yang mengalir serta memakai masker.

Menurut (Theron dan Mchunu, 2014) Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti .

Dalam hal ini, masyarakat juga dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. terlihat bahwa semua pendekatan dalam pencegahan covid-19 membutuhkan partisipasi individu dan masyarakat (publik). masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi secara ketat dalam menerapkan pencegahan covid-19. Partisipasi dapat diartikan dengan

keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sastropetro, (1998:13) bahwa: “Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Kesimpulan

1.Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur digambarkan dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam

penanggulangan covid-19 dengan menerapkan anjuran pemerintah.

2.Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kelurahan Antasan Kecil yaitu :

1.Faktor Pendukung

Disini masyarakat bisa bekerja sama dalam melakukan pencegahan covid-19 dan masyarakat bisa mengetahui bahayanya covid-19 yang mana telah diedukasi oleh pemerintah tentang bahayanya covid-19 serta berupa bantuan sembako buat yang isolasi mandiri dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pencegahan covid-19 seperti melakukan pembagian masker dan penyemprotan diwilayah warga yang terpapar covid-19.

2.Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya virus covid-19 dan kurangnya kedisiplinan masyarakat dengan enggan menerapkan anjuran pemerintah serta kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dan ada masyarakat yang terpapar dan tidak memeriksakan diri kepuskesmas.

Saran

1.Imlementasi kebijakan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-19 dikelurahan antasan kecil timur kota Banjarmasin sebaiknya tidak hanya digambarkan dalam

partisipasi saja sebaiknya digambarkan dalam kondisi keadaan yang sesungguhnya.

2.Dengan diketahuinya hambatan partisipasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dikelurahan antasan kecil timur kota Banjarmasin.

3.Dengan adanya faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi dalam berpartisipasi dalam penanggulangan covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G.Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik ; Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustina, Leo. 2006. Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta.
- Adi,I.R.(2007).Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas (dari pemikiran menuju penerapan) / Isbandi Rukminto AdiNo Title (Ed 1).[Depok] : FISIP UI Press,2007.
- Ach.Wajir Ws.,et al.,ed.(1999).Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat.Jakarta:Sekretariat Bima Desa.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 2002. The Policy Implementation Process. Sage Publication: Beverly Hill
- Moleong, Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyana, Dedey. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Tangerang: Nadi Pustaka.
- Nugroho Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parwito. 2001. Penelitian Komunikasi Kualitatif. sssssYogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Putra, Fadillah 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Said, Zaenal Abidin.2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancar Jiwa.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI: Bandung
- Tangkilisan. 2003. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
- Wahab, Solicin Abdul. 2007. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara: Jakarta
- Westra, Pariata. DKK. 2000. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta.Gunung Agung.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wuryan, Syaifullah. (2008) Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

